

ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SDG TUJUAN 11 DI TINGKAT LOKAL (STUDI KASUS *MEDAN SMART CITY*)

Helga Yohana Simatupang¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, Indonesia

¹ Korespondensi: helgayohana@potensi-utama.ac.id

ABSTRACT

SDGs implementation by the local government is an interesting study driven by the fact that since the implementation of decentralization policy in Indonesia, the fate and quality of life of the people, in practice, have been mostly determined by the performance of the local government at the district/city level. Geographically, Medan City is the gateway to the western part of Indonesia and bordering the Strait of Malacca, making Medan an important city of trade, industry, and business in Indonesia. This city profile requires an integrated system that can facilitate government tasks and activities of the wider community, which can be supported by the development of Medan Smart City which is also in line with the National Strategy Policy for e-Government Development in 2003. This research uses qualitative methods based on data obtained through field studies and literature studies. The position of this article seeks to examine the role and capacity of the Medan City Government in implementing SDG-Goal 11 concerning the realization of inclusive and sustainable cities through the concept of smart city which has been widely applied in various countries and other big cities in Indonesia. This research shows that the means of implementation including funding, technology transfer, and human resources capacity building, which are the keys to the success of the program, have been becoming challenges for the Medan City Government in realizing smart city as a means to achieve sustainable city.

Keywords: Sustainable Development Goals; SDG-Goal 11 Implementation; Medan City Government; Smart City, Opportunity and Challenge

ABSTRAK (Times New Roman, 12)

Implementasi SDGs oleh pemerintah daerah menjadi sebuah kajian yang menarik didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan kebijakan desentralisasi di Indonesia, nasib dan kualitas hidup masyarakat, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Secara geografis, Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan sebagai kota perdagangan, industri, dan bisnis yang penting di Indonesia. Profil kota seperti ini membutuhkan sebuah sistem terpadu yang dapat memudahkan tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat luas, yang dapat didukung dengan pengembangan Medan Smart City yang juga selaras dengan Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi literatur. Posisi artikel ini berupaya mengkaji peran dan kapasitas Pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan SDG Tujuan 11 tentang perwujudan kota yang inklusif dan berkelanjutan melalui konsep smart city yang sudah banyak diterapkan di berbagai negara dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa means of implementation meliputi pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang merupakan kunci dari keberhasilan program tersebut, telah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Medan dalam perwujudan smart city sebagai salah satu alat mencapai kota berkelanjutan.

Kata Kunci: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi SDG Tujuan 11; Pemerintah Kota Medan; Kota Cerdas; Peluang dan Tantangan

PENDAHULUAN

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memastikan terlaksananya pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang inklusif (UNDP, 2017). SDGs bersifat *non- legally binding* dan merupakan bentuk komitmen politik dan kewajiban normatif bagi seluruh negara untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia pun berkomitmen untuk menerapkan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

SDGs bukanlah segugus tujuan asing yang dipaksakan ke dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Sebaliknya, SDGs sepenuhnya sesuai dengan – dan dalam sejumlah kasus – memperkuat Nawa Cita dan RPJMN. Melalui pendekatannya yang inklusif, keterlibatan masyarakat internasional, dan ragam kegiatan teknis ragam kegiatan teknis yang menopangnya, SDGs berpotensi membawa banyak hal ke dalam agenda nasional. Satu hal penting yang patut diperhatikan adalah pengintegrasian agenda global dan nasional perlu dilakukan sejak tahap perencanaan

hingga penganggaran (UNDP Indonesia, 2015).

Di dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, pemerintah daerah merupakan aktor yang memainkan peran strategis dalam pencapaian SDGs (Chrisbiyanto, 2019). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi agar lokalisasi SDGs dilakukan dengan memasukkannya pada perencanaan pembangunan daerah (INFID, 2017). Sebab itu, setiap provinsi diarahkan untuk memiliki Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Selain melalui RAD-TPB, peluang melokalkan SDGs bisa dilakukan pada proses desentralisasi pemerintahan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jasmine, 2017).

Implementasi SDGs oleh pemerintah daerah menjadi sebuah kajian yang menarik didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, nasib dan kualitas hidup masyarakat, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik–buruknya kinerja pemerintah daerah (Hoelman & dkk, 2016). Hal ini terjadi hampir di semua negara di dunia. Benjamin R. Barber dalam buku *If Majors Ruled The World* (2013) meletakkan harapan pada para

walikota untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia dikarenakan tiga alasan berikut: (1) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi; (2) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan (3) para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama (Hoelman & dkk, 2016).

Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat kajian terkait pengimplementasian SDGs Tujuan 11 di tingkat lokal oleh Pemerintah Kota Medan terkait perwujudan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui program *Medan Smart City*. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pengembangan Medan Smart City juga selaras dengan Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Tahun 2003.

Terkait hal tersebut di atas, penulis mengangkat penelitian yang berjudul Analisis Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Medan dalam Mengimplementasikan SDGs Tujuan 11 di Tingkat Lokal (Studi Kasus *Medan Smart City*). Penulis memiliki fokus kajian pada analisis kapasitas dan peran Pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan program Medan Smart City sebagai salah satu alat untuk mencapai kota berkelanjutan. Adapun *means of*

implementation yang digunakan meliputi pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

METODE

Penelitian ini berupaya untuk menemukan suatu pemahaman baru mengenai penelusuran fenomena yang dikaji, yakni tentang peran dan kapasitas pemerintah kota dalam mengimplementasikan agenda global SDGs di tingkat lokal serta mewujudkan *E-Government* melalui pengembangan *smart city*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi literatur. Peneliti melakukan observasi langsung melalui wawancara narasumber yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Medan yang mengurus pengembangan *Medan Smart City*.

Penelitian ini juga menjelaskan sebuah fenomena berdasarkan hasil observasi tidak langsung dimana peneliti memanfaatkan data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran di internet. Data-data yang dikumpulkan berupa artikel yang diterbitkan di jurnal peer review, buku-buku, dokumen pemerintah dan lembaga internasional, surat kabar elektronik, dan website.

Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif

dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang bersangkutan melalui interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Agar peneliti tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat terlalu naratif dan konvensional, penelitian ini juga berusaha menjelaskan faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen peristiwa dari objek penelitian.

KERANGKA TEORITIS

Untuk menjelaskan bagaimana pemerintah kota hadir sebagai aktor penting dalam pengimplementasian agenda global di tingkat lokal, maka diperlukan perspektif atau pendekatan yang digunakan sebagai upaya dalam menjelaskan variabel-variabel dari fenomena tersebut. Artikel ini juga melihat bagaimana respon pemerintah kota dalam menyikapi globalisasi dan memanfaatkan peluang melalui program smart city sebagai salah satu alat perwujudan kota berkelanjutan yang merupakan capaian SDGs, khususnya Tujuan 11. Selain itu, penulis merasa penting untuk memahami keterhubungan antar konsep kunci tersebut dengan menelaah studi-studi terkait yang pernah dilakukan.

Lebih dari 190 pemimpin dunia dari berbagai negara melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan

rencana aksi global berlaku sejak 2016-2030 sebagai lanjutan *Millenium Development Goals*, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs (INFID, 2017).

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam SDGs merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa membatasi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (*No-One Left Behind*) merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal (INFID, 2017).

Tingginya laju urbanisasi menyebabkan semakin padatnya perkotaan di Indonesia dan dunia. Diperkirakan pada tahun 2025, lebih dari 68% penduduk akan tinggal di perkotaan, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran

(Suhono, 2016). SDGs Tujuan 11 adalah sebuah upaya memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi (UCLG-ASPAC, 2015). Perkotaan di dunia mencakup hanya 2% dari luas daratan, namun perlu disadari bahwa (1) kota berkontribusi terhadap 70% dari PDB dunia; (2) kota menggunakan lebih dari 60% penggunaan energi global; (3) kota menghasilkan 70% emisi gas rumah kaca dunia; dan (4) kota menghasilkan 70% limbah global.

SDGs Tujuan 11 berfokus pada penanganan tantangan perkotaan dalam menciptakan kesempatan dan kemakmuran tanpa menghabiskan lahan dan sumber daya. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia, tengah menghadapi tantangan terkait pengelolaan urbanisasi berkelanjutan. Hal ini secara positif dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, namun juga memberi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pemukiman berkelanjutan disertai infrastruktur yang layak, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan (Sembiring, 2015).

Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) bertema *Sustainable Urban Development* adalah agenda yang akan menjadi panduan dalam upaya pembangunan perkotaan yang melibatkan peran luas dari negara, wali kota dan gubernur, penyandang dana pembangunan internasional, program PBB, dan masyarakat sipil secara terpadu dan

terkoordinasi di tingkat global, regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota (PBB, 2017). Kota-kota di dunia memainkan peran sentral dalam mempersiapkan, memitigasi, dan beradaptasi dengan krisis seperti pandemi. Faktanya, banyak norma dan aturan bagi kota untuk mengelola penyakit menular sebelumnya sudah pernah dibahas misalnya pada Konferensi Sanitasi Global padatahun 1851.

Saat ini, kesiapan kota bervariasi diseluruh dunia, tergantung dari tingkat perkembangan serta faktor-faktor penentu sosial-ekonomi dari populasi mereka. Kota-kota dengan konsentrasi tinggi kaum miskin dan dibarengi dengan ketidakadilan yang tinggi ternyata berpotensi lebih rentan daripada kota-kota yang memiliki sumber daya yang lebih baik, kepadatan yang rendah, serta lebih inklusif (Dwikardana, 2020).

Konsep *smart city* yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini, pemerintah daerah (PSPPR UGM, 2016). Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Konsep *smart city* berupaya menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan (Kominfo, 2017). Selain itu juga bertujuan mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi di kota tersebut, kemudian menarik penghuni baru baik dari kalangan profesional, akademisi, dan usahawan untuk bermukim di kota tersebut.

Pemerintah berfokus pada kebijakan dan strategi untuk memanfaatkan kekuatan di balik urbanisasi secara efektif dengan membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan, berdaya saing, dan pengembangan tata kelola *Smart City* di Indonesia yang dirangkum dalam 6 Dimensi yakni *Smart Governance*, *Smart Infrastructure*, *Smart Environment*, *Smart People*, *Smart Living*, dan *Smart Economy* (Agam, 2018). Sebuah kota yang cerdas harus berfokus pada pengelolaan dan manajemen yang baik akan infrastruktur dasar misalnya terjaminnya suplai air bersih dan listrik, sistem sanitasi lingkungan yang bersih, transportasi yang nyaman yang selalu didukung oleh konektivitas teknologi informasi, dan jaringan internet yang kuat. Semuanya ini akan menyatukan partisipasi warga dan pemerintah dalam sebuah pengelolaan kota yang berbasis *e-governance*.

Smart city dapat membantu pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. (Suhendra & Ginting, 2018). Untuk menganalisis peluang dan tantangan yang muncul di tingkat lokal, dapat digunakan *means of implementation* SDGs Tujuan 11 yang meliputi pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (Soetikno, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kapasitas Pemerintah Kota Medan Dalam Mengimplementasikan SDGs Tujuan 11 Melalui Medan Smart City

Dalam konteks pengimplementasian SDGs di tingkat lokal, Vera Freyling (2015) menegaskan bahwa: "...*due to the scope of global urban transition, major successes or failures will hinge upon progress made on the urban goal (SDG 11), as well as on the ability of global actors to localize all 17 SDGs...*" Pernyataan tersebut memiliki pengertian bahwa ketika para pemimpin dunia telah setuju untuk mengimplementasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ambisius pada tahun 2030, berdasarkan cakupan transisi perkotaan yang global, keberhasilan atau

kegagalan utama akan bergantung pada kemajuan yang dibuat pada tujuan perkotaan (SDG Tujuan 11), serta pada kemampuan aktor global untuk melokalkan keseluruhan 17 Tujuan SDG.

Dalam rangka mewujudkan komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, pada level nasional, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Tim Koordinasi Nasional SDGs berada di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Bappenas, 2017).

Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal. Kepala daerah berperan dalam melakukan komunikasi politik dengan pihak lain yang terkait dan memastikan tujuan SDGs masuk di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Dalam pencapaian SDGs, pemerintah di tingkat lokal berperan untuk memastikan keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat, serta keberlanjutan fungsi ekologi. (Mediaindonesia.com, 2019)

Pembentukan *smart city* di Indonesia

sebenarnya telah termaktub dalam pelaksanaan program *E-Government* di Indonesia yang diwujudkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini praktis yang isinya memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi sampai pada tingkatan pemerintahan daerah (Suhendra & Ginting, 2018).

Dalam upaya mendukung pengembangan *E-Government*, selanjutnya pemerintah pusat telah mencanangkan Indonesia pada tahun 2030 yang akan mengimplementasikan *smart city* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengembangan *smart city* diharapkan dapat mendukung pelayanan publik berbasis teknologi yang pada akhirnya mempermudah tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat luas.

Dalam rangka mendukung pengembangan *smart city* di tingkat kota, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan. Urgensi pembentukan Perwal tersebut didasarkan pada pengembangan dan sinergitas dari seluruh

potensi dan sumber daya secara terintegrasi. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Medan juga telah membuat Master Plan Peta Jalan Pembangunan Smart City untuk membangun keterpaduan antar Organisasi Perangkat Daerah (Suhendra & Ginting, 2018).

Berdasarkan Perwal No. 28 Tahun 2018, tujuan dari Pengaturan Smart City Pemerintah Kota Medan adalah; (a) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Smart City untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dan masyarakat; (b) menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan Smart City Kota Medan; (c) mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi Smart City Kota Medan; (d) peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan (e) membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Medan.

Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Medan dalam Mengimplementasikan SDGs Tujuan 11 Melalui Medan Smart City

Program smart city merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, agar dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di kawasan dan dunia internasional. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Keberadaan Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka yang cukup modern sebagai pintu gerbang atau pintu masuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor), menjadikan Medan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat. Secara geografis, kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber Daya Alam (Ditjen Cipta Karya, "Profil Kota Medan").

Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Dengan potensi tersebut, Pemerintah Kota Medan pun berambisi memajukan Kota Medan semaju kota-kota besar lainnya, tidak saja seperti Jakarta atau Surabaya di Jawa, tetapi juga kota-kota di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur.

Sebagai sebuah kota, Medan mewadahi berbagai fungsi, yaitu, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat akomodasi

kepariwisataan, serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasional. Melihat potensi tersebut, Walikota Medan memiliki inovasi kebijakan yang telah disuarakan kepada masyarakat mengenai layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online melalui program *Medan Smart City*.

Dukungan Pemko Medan untuk program ini terlihat pada pengembangan aplikasi Medan Rumah Kita (MRK) yang terintegrasi dengan Program LAPOR Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)" melalui kebijakan "no wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani (Pemko Medan, 2017). Fokus lainnya adalah pemantapan sistem transportasi yang menyentuh pada aspek strategis dan pembagian multi moda dan antar moda transportasi yang sesuai dengan potensi wilayah (Pemko Medan, 2017).

Dari hasil asesmen melalui studi lapangan (Siregar, 2020) dan berbagai studi pustaka, peneliti menemukan peluang dan tantangan Pemko Medan dalam pengembangan Program Medan Smart City yang dirangkum dalam *means of implementation* sebagai berikut:

1. Pendanaan

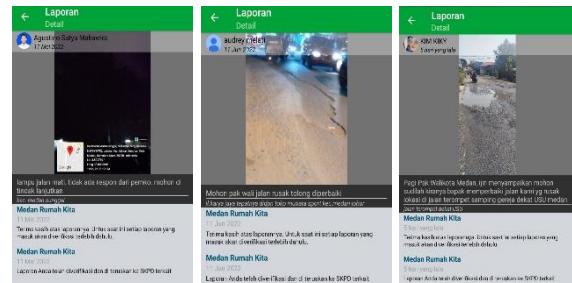
Persoalan fiskal kerap luput dari perhatian daerah untuk mengembangkan *smart city* dalam rangka implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang digagas pemerintah pusat. Jika 80% dari total APBD dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah daerah, tentunya akan sulit untuk mengembangkan *smart city*. Keberlanjutan sisi fiskal harus dipertimbangkan secara matang dalam memenuhi kebutuhan anggaran *smart city* (Kominfo, 2017). Dalam Peta Jalan Smart City Medan, tertulis bahwa sumber pembiayaan program Smart City Medan didominasi oleh APBD. Selain APBD, pendanaan beberapa program kerja untuk mencapai keenam dimensi Smart City Medan, yaitu: *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment* juga didapatkan melalui sumber-sumber lain, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan (DAK Dinkes), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa tantangan Pemko Medan yang menjadi sorotan peneliti adalah terkait pemborosan belanja TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang sangat mahal, padahal pada prinsipnya belanja TIK tersebut harus berdaya guna. Selain itu, terjadi pengurangan anggaran dari tahun ke tahun dari Kominfo (selaku *leading sector*) untuk pengembangan Smart City di Indonesia, yang

tentunya juga berdampak pada Kota Medan. Hal ini dipersulit dengan kurangnya perhatian dan kemauan (*willingness*) dari Pemerintah Kota Medan untuk mengalokasikan anggaran khusus terkait pengembangan Medan Smart City. Kondisi ini semakin dipersulit dengan peristiwa pandemi di tahun 2020, dimana anggaran mulai dari pusat hingga daerah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, yang mana hal ini tentunya juga berdampak pada pengembangan Smart City.

2. Transfer Teknologi

Salah satu bagian dari Rencana Aksi Smart City Kota Medan adalah Rencana Pengembangan Perangkat Pendukung Smart City Medan (RP3SCM). Dalam *Executive Summary Smart City Medan 2018*, tertuang bahwa pembangunan *command center* menjadi fokus Pemerintah Kota Medan untuk mendukung implementasi dari Smart City Kota Medan. Untuk membangun *command center*, diperlukan tiga komponen, yaitu ruang pendukung *command center*, perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan smart city yang dirangkum dalam 6 Dimensi Smart City yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment* haruslah dibangun suatu ekosistem yang mendukung pengembangan 6 dimensi ini. Instrumennya berupa aplikasi, regulasi, dan keintegrasian antar aplikasi. Pada tahun 2019, aplikasi Medan Rumah Kita yang berfungsi sebagai media pengaduan keluhan

masyarakat, telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! dan telah mendapatkan apresiasi dari KemenPAN-RB dan Ombudsman RI. Sangat disayangkan aplikasi ini tidak dikembangkan seutuhnya sehingga tidak terintegrasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain. Hal ini mengakibatkan pengaduan keluhan di masyarakat tidak dapat ditanggapi secara cepat dan tepat. Dalam pengembangan Medan Smart City, selama ini yang dibangun hanyalah bangunan teknologi yang canggih namun fungsinya kurang dimaksimalkan. Berikut adalah contoh dimana pengaduan masyarakat yang dilaporkan melalui aplikasi Medan Rumah Kita dibalas hanya dengan template yang sama, namun tidak ada bukti nyata sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan atau pembenahan oleh SKPD/OPD terkait.



Gambar 1. Contoh Pengaduan Masyarakat Di Aplikasi Medan Rumah Kita

3. Pembangunan Kapasitas SDM

Pembelajaran TIK yang sangat mahal tidak dibarengi dengan literasi digital birokrasi dan masyarakat yang ternyata masih sangat minim. Smart city haruslah dipandang sebagai suatu kebutuhan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tantangan terkait pembangunan kapasitas SDM yang paling

menonjol yaitu kurangnya tenaga untuk mengelola sistem Smart City Kota Medan. SDM yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup mumpuni dalam bidang teknis, namun memiliki kekurangan dalam kemampuan manajerial dan sosio-kulturalnya. Hal ini menyebabkan SDM pengelola smart city kurang sinkron program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan. SDM pengelola Medan Smart City haruslah mampu dalam memahami proses, manajemen proyek, dan memiliki keterampilan manajemen perubahan. Apabila tidak terdapat agen perubahan yang membantu di tingkat pemerintah lokal, risiko kegagalan pengembangan smart city sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, program-program peningkatan kapasitas seharusnya dilakukan sebelum atau paling tidak saat program sedang berjalan, bukan setelahnya. Pemko Medan telah menandatangani MoU dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara untuk program peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem smart city. Walaupun begitu, tenaga yang melatih dan dilatih jumlahnya juga cukup terbatas, sehingga diseminasi informasi ke publik juga tidak berjalan lancar. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah OPD-OPD di Kota Medan sering berbeda pemahaman dalam visi dan misi untuk pengembangan smart city, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan *knowledge-sharing* secara berkelanjutan dari Diskominfo selaku *leading sector* Program

Medan Smart City kepada OPD-OPD yang ada di wilayah Kota Medan. Pada akhirnya, sebagai target dari program smart city, peningkatan kapasitas di berbagai lapisan masyarakat perlu digalakkan secara kontinu. Masyarakat perlu menjadikan smart city sebagai suatu kebutuhan di era globalisasi seperti sekarang. Masyarakat Kota Medan perlu memahami bahwa sebuah kota dengan dukungan teknologi pintar dalam menunjang aktivitas sehari-hari akan semakin memudahkan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, program smart city haruslah didukung oleh masyarakat yang memiliki pola pikir modern. Setiap elemen masyarakat yang hidup di area perkotaan haruslah memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan, pemanfaatan teknologi yang maksimal, serta kesadaran akan pentingnya pola hidup cerdas, yang pada akhirnya dapat membantu perwujudan kota berkelanjutan.

SIMPULAN

Keberhasilan pengimplementasian SDGs Tujuan 11 melalui pengembangan smart city ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan media. Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis data-data yang tersedia, implementasi program Medan Smart City masih tengah berlangsung, baik dari segi penganggaran, transfer teknologi berupa

pengembangan berbagai infrastruktur dan aplikasi pendukung, pembangunan kapasitas SDM pengelola, serta peningkatan literasi digital masyarakat kota Medan sebagai target dari program ini. Hal tersebut dapat berjalan dengan cepat dan sesuai target apabila koordinasi kebijakan Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan selaku *leading sector* dari program Medan Smart City dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilakukan lebih intens dan berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga belum menilai program Medan Smart City sebagai suatu kebutuhan seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal ini tak terlepas dari sosialisasi program yang belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Kehadiran aplikasi Medan Smart City dan Medan Rumah Kita belum dirasakan secara maksimal manfaatnya oleh masyarakat akibat minimnya literasi digital masyarakat dan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyebabkan pengajuan keluhan dari masyarakat tidak dapat direspon secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, para pegawai di Pemko Medan dan OPD terkait penting untuk memahami program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan yang termaktub dalam RPJMD khususnya di Kota Medan. Pengintegrasian data antar OPD sebaiknya menjadi prioritas bersama agar pelayanan publik dapat

ditindaklanjuti secara efisien. Pengembangan Medan Smart City juga perlu dipercepat untuk mendukung pelayanan publik secara daring di masa pandemi COVID-19, terkhusus dalam hal pemetaan dan pemanfaatan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa krisis yang mengharuskan pembatasan sosial seperti sekarang dan sebagai upaya pencegahan terhadap krisis-krisis lain di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agam, S. (2018). Menuju 100 Smart City. Diakses dari <http://indonesiabaik.id/infografis/men-ujung-100-smart-city-1>
2. Bappenas. (22 Agustus 2017). *Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDGs dan Tindak Lanjutnya*. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/perpres-no-59-tahun-2017-tentang-sdgs-dan-tindak-lanjutnya/>
3. Barber, B. R. (2013). *If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities*. New Haven: Yale University Press.
4. Chrisbiyanto, A. (2 Mei 2019). Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1400626/8/pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs-1556745899>
5. Dirjen Cipta Karya. *Profil Kota Medan*. Medan: Dinas PUPR Kota Medan. Diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumut/medan.pdf>
6. Dwikardana, S. (April 2020). Reinventing Cities as Global Players. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Edisi Khusus*, 95-102.

- doi:<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3876.95-102>
7. Freyling, V. (November 2015). Implementing the SDGs in Cities. (M. Woodbridge, Ed.) *ICLEI Briefing Sheet* (Urban Issues, No. 05).
 8. Hariansyah, M. (28 Januari 2018). Menyongsong Medan Smart City. Medan. Diakses dari <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menyongsong-medan-smart-city/494858/2018/01/29>
 9. Hoelman, M. B., & dkk. (2016). *Sustainable Development Goals - SDGs: Panduan untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah* (June ed.). Jakarta: INFID.
 11. INFID. (2017). *Apa itu SDGs?* Diakses dari [sdgs2030indonesia.org: https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu](https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu)
 12. INFID. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/5-perpres>
 13. Jasmine, S. (14 Desember 2017). Melokalkan Realisasi SDGs. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/sherlyjasmimin/5a31d895bde5750e150dedb4/melokalkan-realisisi-sdgs>
 14. Kominfo. (28 November 2017). Langkah Menuju "100 Smart City". Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smartcity/0/sorotan_media
 15. Marisa, H., & Andree. (2019). Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2030. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(2). doi:[https://doi.org/10.25299/jdis.2019.v0i2\(02\).5117](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.v0i2(02).5117)
 16. MedanBisnisDaily. (1 Agustus 2018). Masterplan Smart City Kota Medan Dibuat Ahli dari UGM. Diakses dari http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/10/01/52815/masterplan_smart_city_kota_medan_dibuat_ahli_dari_ugm/
 17. Mediaindonesia.com. (3 Mei 2019). Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/233224/pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs>
 18. Pemko Medan. (4 April 2017). Strategi Medan Menuju Smart City. Medan. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/artikel-16384-strategi-medan-menuju-smart-city.html>
 19. Pemko Medan. (13 Desember 2017). Pemko Berpacu Wujudkan Medan Smart City. Medan. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/artikel-17076-pemko-berpacu-wujudkan-medan-smart-city.html>
 20. Pemko Medan. (2018). *Analisis Strategis Smart City Kota Medan*.
 21. Pemko Medan. (2018). *Executive Summary Smart City Kota Medan*.
 22. Pemko Medan. (2018). *Master Plan Smart City Kota Medan*.
 23. Pemko Medan. (2018). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Smart City Kota Medan*.

24. PBB. (2017). *Agenda Baru Perkotaan*. Sekretariat Habitat III.
25. PSPPR UGM. (2016). Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City. *Working Paper PSPPR UGM 2016*. Diakses dari https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf
26. Purba, F. S. (2018). Politik Pembangunan Wali Kota Medan Dalam Mengembangkan Medan Smart City. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10531/140906031.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
27. Sanjaya, B. (2000). *Membangun Indonesia dari Pinggiran*. Medan: Gramedia.
28. Sembiring, E. K. (2015, Juni 7). Pemerintah Antisipasi Pertumbuhan Urbanisasi 68%. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1009630/34/pemerintah-antisipasi-pertumbuhan-urbanisasi-68-1433600268>
29. Siregar, L. P. (10-11 September 2020). Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Medan Dalam Mewujudkan Medan Smart City. (H. Y. Simatupang, Interviewer)
30. Soetikno, T. P. (2016). Implementasi SDGs di Tingkat Global dan Keterkaitannya dengan Isu Kekayaan Intelektual. Diakses dari <http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/Toferry-P-Soetikno-Implementasi-SDGs-di-Tingkat-Global-dan-Keterkaitannya-dengan-HAKI.pdf>
31. Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 185-195. doi:10.21787/mp.2.3.2018.185-195
32. Suhono, A. (2016, April 27). Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Sebagai Jalan Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan. *Sosialisasi Nasional "Program Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku)*. Jakarta.
33. UCLG-ASPAC. (2015). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta. Diakses dari <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>
34. UNDP. (November 2015). *Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN, dan 'SDGs'*. Jakarta: UNDP Indonesia.
35. UNDP. (2017). *Strategi Integrasi SDGs Ke Dalam Agenda Pembangunan Daerah*. Jakarta: UNDP Indonesia.